

DAFTAR PUSTAKA

- Afina, Y. A. (2018). Analisis Aspek Perpajakan Kerja Sama Operasi (Joint Opertaion) Dalam Perspektif Pajak Penghasilan. Indonesia.
- Ardianto, Y. (2019, 03 06). Memahami Metode Penelitian Kualitatif.
- Aulina, L. (2022, April 10). *REGULASI PERPAJAKAN JOINT OPERATION PADA USAHA JASA KONSTRUKSI*. Diambil kembali dari Kenny Winston Law Offices: <https://www.kennywiston.com/regulasi-perpajakan-joint-operation-pada-usaha-jasa-konstruksi/>
- Dewi, M. S., & Lestari, S. B. (2012). Penerapan Pajak Penghasilan pada Perusahaan Joint Venture (Studi Kasus: PT. Bk, Persero). *Binus Business Review*.
- Ginting, R. B. (2021). Analisis Aspek Pajak Penghasilan Pada Wajib Pajak Joint Operation (JO). Indonesia.
- Jayady, A. (2017). Joint Operation Dalam Studi Kualitatif. *Jurnal Karkasa*.
- Kartika, N., & Tjaraka, H. (2018). ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Airlangga*.
- Kementerian Keuangan. (1989). Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-323/PJ.42/1989 Tentang Masalah Perpajakan Bagi Joint Operation. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Kementerian Keuangan. (1994). Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-44/PJ./1994 Tentang Pemecahan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Kementerian Keuangan. (2020). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-04/PJ/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor

Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Khaerunnisa, I., & Amrullah. (2020). Analysis on joint operation non administrative accounting models of property development firms and the impact of taxation.

Mauliyani, E. S., Miru, A., & Said, N. (2014). KEDUDUKAN PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASI (KSO) DALAM HUKUM.

Nurisdianto, E. W. (2019, 07 19). *Betapa Krusialnya Pajak dalam Portal Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Diambil kembali dari Direktorat Jenderal Pajak Web Site: <http://www.pajak.go.id>

Pemerintah Indonesia. (2012). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Jakarta: Pemerintah Indonesia.

Pemerintah Indonesia. (2016). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya. Jakarta: Pemerintah Indonesia.

Pemerintah Indonesia. (2021). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jakarta: Pemerintah Indonesia.

Pemerintah Indonesia. (2021). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jakarta: Pemerintah Indonesia.

Purnawan, A. (2011). REKONSTRUKSI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN (PPh). *Jurnal Dinamika Hukum*.

Santoso, P. T., Asyik, N. F., & Priyadi, M. P. (2019). KAJIAN FENOMENOLOGI EVALUASI JOINT OPERATION–NON SEPARATE VEHICLE DENGAN METODE PROFIT SHARING PADA PERUSAHAAN EKSPEDISI. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*.

Sari, D. (2020). KARAKTERISTIK PERJANJIAN KERJASAMA OPERASI/JOINT OPERATION. *Lex LATA*.

Sibarani, P., & Tarigan, T. M. (2018). *Pajak Penghasilan Indonesia*. Penerbit Andi.

Soerodjo, I. (2020). Joint Venture as a Model of Cooperation in the Infrastructure Projects in Indonesia. *International Journal of Economics & Business Administration (IJEBA)*.

Sujoko, A. (2020). Teori dan Praktik Berkontrak dengan Penyedia Kerja Sama Operasi (KSO) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Administrative Law & Governance Journal*.